



BADAN PEMERIKSA KEUANGAN PERWAKILAN PROVINSI BANTEN

SIARAN PERS

BPK Perwakilan Banten Serahkan LHP LKPD Tahun 2022 kepada Pemerintah Kota Tangerang

Serang, 8 Mei 2023 – Kepala Perwakilan BPK Banten, **Emmy Mutiarini** menyerahkan LHP atas LKPD Kota Tangerang Tahun 2022 kepada Ketua DPRD Kota Tangerang, Gatot Wibowo, S.IP. dan Wali Kota Tangerang, H. Arief R. Wismansyah, BSc., M.Kes. di Kantor BPK Perwakilan Provinsi Banten, Serang (8/5).

Pemeriksaan atas LKPD merupakan bagian dari tugas konstitusional BPK. Berdasarkan pemeriksaan yang telah dilakukan BPK Perwakilan Provinsi Banten atas LKPD Kota Tangerang Tahun 2022, termasuk implementasi atas rencana aksi yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Tangerang, maka BPK memberikan opini **Wajar Tanpa Pengecualian** atas LKPD TA 2022 kepada Pemerintah Kota Tangerang.

Namun demikian, tanpa mengurangi keberhasilan yang telah dicapai Pemerintah Kota Tangerang, BPK masih menemukan permasalahan terkait pengelolaan keuangan daerah. Permasalahan-permasalahan yang harus segera ditindaklanjuti antara lain:

1. Pengelolaan Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan Belum Dilaksanakan Secara Memadai;
2. Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Belanja Barang dan Jasa BOS pada Dinas Pendidikan Tidak Sesuai Ketentuan;
3. Pelaksanaan 16 Paket Pekerjaan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang tidak Sesuai Spesifikasi Kontrak;
4. Penyajian Piutang PBB Belum Didukung Data Wajib Pajak yang Memadai; dan
5. Penatausahaan Aset Tetap Belum Dilaksanakan Secara Memadai.

Pasal 20 UU Nomor 15 Tahun 2004 mengamanatkan bahwa pejabat wajib menindaklanjuti rekomendasi LHP dengan memberikan jawaban atau penjelasan kepada BPK selambat-lambatnya 60 hari setelah LHP diterima.

Berdasarkan data rekapitulasi pemantauan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK per Semester II 2022, Pemerintah Kota Tangerang telah menindaklanjuti 796 rekomendasi dari 931 rekomendasi atau 85,51% dari seluruh rekomendasi periode 2005 – 2022. Dengan demikian masih terdapat 135 rekomendasi (14,49%) yang harus menjadi prioritas untuk segera ditindaklanjuti.

Dalam sambutannya Emmy Mutiarini menyampaikan harapannya agar Pimpinan DPRD dapat ikut memantau penyelesaian tindak lanjut atas rekomendasi hasil pemeriksaan yang terdapat dalam LHP ini sesuai dengan kewenangannya. “Kami berharap agar hasil pemeriksaan tersebut dapat memberikan dorongan dan motivasi untuk terus memperbaiki pertanggungjawaban pelaksanaan APBD,” ungkap Emmy Mutiarini.